

TAHUN
2023

KPKNL
SORONG

LAPORAN KINERJA

KPKNL SORONG

Disusun Oleh:

Tim Penyusun
Laporan Kinerja
Tahun 2023

 0951-3160219

 @kpknlsorong_



PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, nomor ND-4493/KN.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Sorong pada Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Sorong dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Sorong dengan Dirjen DJKN Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Sorong Tahun 2023 sebesar 111,21%.

Kami harap penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Sorong. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat kerja, kerja, kerja dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Sorong yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Sorong



Ditandatangani secara elektronik
Antonius Arie Wibowo



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1. Berdasarkan Golongan.....	3
2. Berdasarkan Pendidikan.....	3
3. Tenaga Fungsional.....	4
B. Peran Strategis.....	7
C. Permasalahan.....	8
D. Upaya Pemecahan Masalah.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	11
1. Visi.....	11
2. Misi.....	11
3. Tujuan.....	12
4. Sasaran.....	12
5. Kebijakan.....	12
6. Program.....	13
B. Penetapan Kinerja.....	13
C. Pengukuran Kinerja.....	15
BAB III PERENCANAAN KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan.....	20
a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.....	20
b. Persentase produktivitas lelang.....	22
c. Indeks Integritas.....	22
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.....	23
a. Persentase realisasi pokok lelang.....	23
b. Persentase Penurunan outstanding piutang negara.....	23
3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.....	24
a. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan.....	24
b. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).....	25
c. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.....	26
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.....	26
a. Deviasi ketergunaan hasil penilaian.....	26
b. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.....	27
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif.....	28

a.	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	28
b.	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	28
c.	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	29
6.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	30
a.	Tingkat efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	30
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	31
a.	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	31
b.	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	32
c.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	33
8.	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	34
a.	Tingkat efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	34
9.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	35
a.	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	35
b.	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	36
C.	Akuntabilitas Keuangan	37
1.	Realisasi Anggaran	37
2.	Realisasi PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	38
BAB IV	PENUTUP	39
A.	Simpulan Umum	40
B.	Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang	40





DJKN KPKNL
SO SONG

1 BAB SATU

Pendahuluan



#TRAKOSONG

Tertib
Andalan
Kontributif
Solutif
Ngegas Terus

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tugas dan fungsi serta struktur organisasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Sorong mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Sorong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun wilayah kerja KPKNL Sorong adalah meliputi 2 Provinsi yang terdiri dari 1 (satu) Kota dan 12 (dua belas) dengan perincian sebagai berikut:

1. Propinsi Papua Barat Daya
 - 1) Kota Sorong
 - 2) Kabupaten Sorong
 - 3) Kabupaten Sorong Selatan
 - 4) Kabupaten Maybrat
 - 5) Kabupaten Tambrauw
 - 6) Kabupaten Raja Ampat



2. Propinsi Papua Barat
 - 1) Kabupaten Manokwari
 - 2) Kabupaten Manokwari Selatan
 - 3) Kabupaten Fakfak
 - 4) Kabupaten Teluk Wondama
 - 5) Kabupaten Teluk Bintuni
 - 6) Kabupaten Kaimana
 - 7) Kabupaten Pengunungan Arfak

Sumber Daya Manusia (SDM) KPKNL Sorong yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Sorong dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	I	-	-	0
2	II	12	-	12
3	III	10	1	11
4	IV	1	-	1
Total			1	24



2. Berdasarkan Pendidikan

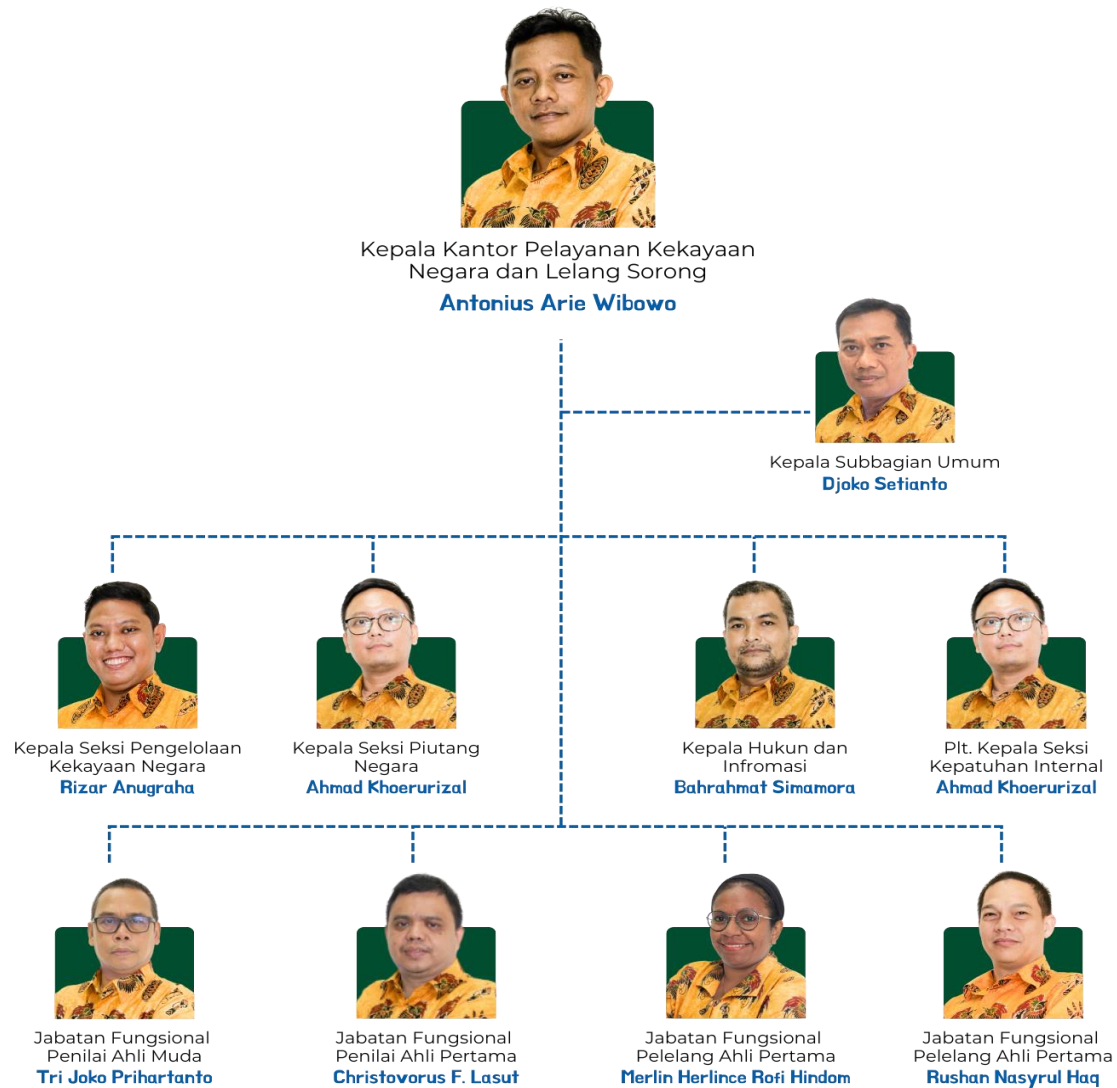
No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	0
2	SLTP	-	-	-	-	0
3	SLTA / DI / DII	-	6	1	-	7
4	DIII	-	6	-	-	6
5	DIV / S1	-	-	9	-	9
6	S2	-	-	1	1	2
7	S3					
Total			12	11	1	24

3. Tenaga Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Total
1	Pejabat Lelang	2
2	Penilai Pemerintah	2
3	Pengadaan Barang dan Jasa	1
4	Bendahara Penerimaan	1
5	Bendahara Pengeluaran	1
6	Jurusita DJKN	2
7	PIC TIK	4
8	Sekretaris	0



Adapun struktur organisasi KPKNL Sorong sebagai berikut ini :



Penjelasan struktur organisasi KPKNL Sorong :

1. Kepala Kantor, eselon IIIA;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), eselon IVA, dengan 4 (empat) orang pelaksana dan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), eselon IVA, dengan 4 (empat) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana merangkap Jurusita;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana dan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Seksi Ketauhan Internal (Plt. Kasi KI), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
7. Jabatan Fungsional Pelelang 2 (dua) orang;

8. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 2 (dua) orang.

Dalam kegiatan operasional, KPKNL Sorong telah menempati gedung di kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, Jalan Basuki Rahmat Km.7, Sorong, dengan total luas 750m² yang terdiri dari :

1. Lantai I terdapat ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu dengan fasilitas TV dan *Free WiFi*, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Fungsional Penilai Pemerintah, Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang *E-Auction*, ruang Arsip (seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Seksi Piutang Negara), ruang dapur (*Pantry*) dan kamar mandi/toilet;
2. Lantai II terdapat ruang Kepala KPKNL Sorong, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Fungsional Pelelang, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Server, ruang BKPN, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet.

Prasarana lain yang dimiliki KPKNL Sorong adalah aula/gedung pertemuan yang difungsikan untuk penyimpanan arsip, terletak di Jl. Sudirman No. 8, Sorong yang berdiri di atas tanah seluas 1.784m², (luas gedung 280m² dan halaman gedung 1.504m²).

Disamping itu, KPKNL Sorong memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

- Kendaraan operasional sebanyak 5 (lima) unit roda empat dan 5 (lima) unit sepeda motor.
- Komputer (PC) sebanyak 19 unit, laptop 18 unit dan printer sebanyak 12 unit, server 2 unit, dan UPS sebanyak 29 unit.
- Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 7 (tujuh) unit yang berdiri diatas sebagian tanah GKN Sorong (yang dipinjam pakai melalui Kantor Pusat DJKN ke Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI) dan 1 (satu) unit berdiri di atas tanah KPKNL Sorong (Jalan Jenderal Sudirman No.8, Sorong). 8 (delapan) Rumah dinas tersebut terdiri dari 1 (satu) unit ukuran 70m² untuk kepala kantor dan 7 (tujuh) unit ukuran 50m² untuk kasubbag umum dan para kepala seksi.



B. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Sorong mempunyai peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Sorong berperan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara itu sendiri. Peningkatan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara tersebut terutama pada utilisasi kekayaan negara dan pengamanan kekayaan negara. Peran strategis KPKNL Sorong dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja (Satker) berupa Inventarisasi dan Penilaian BMN, Utilisasi BMN, Pemindatanganan BMN dan Penetapan status BMN. Selain itu KPKNL Sorong juga memiliki tugas melaksanakan penilaian aset (BMN) yang berperan strategis menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau *HBU*)

2. Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan Non Performing Loan menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah Nyata yang dilaksanakan KPKNL Sorong dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Sorong berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung ;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang ;
- c. Melaksanakan penggalan piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
- d. Pemberian sosialisasi / pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun

noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Pelayanan lelang ditujukan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk peralihan hak. Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Sorong telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Cabang Sorong untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan virtual account (VA). Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong memperoleh bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pelayanan pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa BMN pada satker Kementerian/Lembaga.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan Internal :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah KPKNL dengan wilayah kerja yang cukup luas (1 kota dan 12 kabupaten) dengan stakeholder yang cukup banyak.
2. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari KPKNL Sorong. Hal ini karena luas dan sulitnya wilayah kerja dari KPKNL Sorong.
3. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti kendaraan operasional, PC, Laptop, dll.

Permasalahan eksternal :

1. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Sorong yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut dan udara;

2. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilaksanakan.
3. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja KPKNL Sorong.

D. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah Internal :

1. Telah diajukan permohonan penambahan pegawai ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai KPKNL Sorong untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Sorong juga sering mengadakan sosialisasi internal (*knowledge sharing*) maupun sosialisasi dengan mengundang narasumber dari luar KPKNL Sorong.
2. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL untuk belanja modal dan belanja barang.

Permasalahan eksternal :

1. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan dan asistensi kepada *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Sorong.
2. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko tinggi.
3. Melaksanakan kegiatan rapat dan koordinasi dengan video conference dengan aplikasi zoom meeting.





DJKN **KPKNL**
SO RONG

BAB DUA

Perencanaan Kinerja

#TRAKOSONG

Tertib
Andalan
Kontributif
Solutif
Ngegas Terus

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

KPKNL Sorong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KPKNL yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Visi KPKNL Sorong mengikuti visi yang telah ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu :

“MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA, PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG YANG PROFESIONAL DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Sorong dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan kedalam phrasa sebagai berikut :

- a. **Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang** adalah sebagai lembaga/institusi pemerintah yang berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengkomodasi kepentingan transaksi masyarakat.
- b. **Profesional** dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.
- c. **Bertanggung jawab** dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan misi, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari visi dan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai KPKNL adalah :

1. Pengamanan dan pengembalian keuangan Negara, serta memberi kontribusi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) melalui biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan bea lelang;
2. Pelayanan lelang;
3. Pelayanan kekayaan Negara;
4. Pelayanan penilaian kekayaan Negara;
5. Pembinaan sumber daya manusia;

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Dalam menentukan sasaran yang akan dicapai diupayakan sasaran dimaksud serealitis mungkin dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh KPKNL Sorong adalah :

1. Mempercepat penyelesaian kasus piutang Negara dan pencapaian target;
2. Terciptanya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan minimalisasi perkara hukum;
5. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan Negara;
6. Melaksanakan penilaian kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan nilai wajar kekayaan Negara;
7. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi KPKNL Sorong.

5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai

sasaran. Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang Negara
2. Peningkatan pengelolaan barang jaminan
3. Peningkatan kualitas pelayanan lelang
4. Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
5. Optimalisasi barang milik Negara
6. Penilaian kekayaan Negara
7. Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Sorong

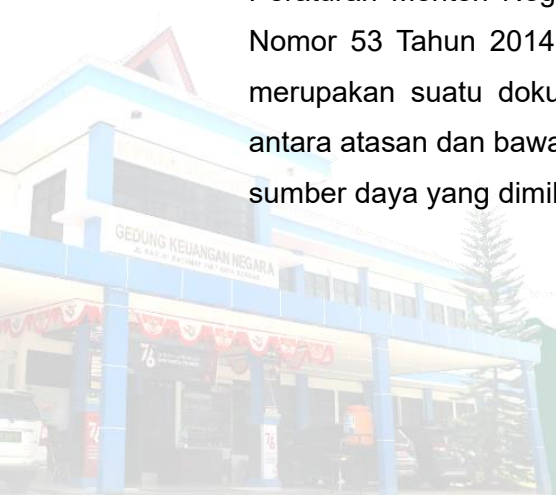
6. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong diuraikan dalam program sebagai berikut :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang Negara;
2. Pengaman barang jaminan;
3. Percepatan pelayanan lelang;
4. Mengoptimalkan sistem administrasi data PPLN;
5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
6. Pelayanan di bidang kepegawaian;
7. Pelayanan di bidang keuangan;
8. Pelayanan di bidang umum;
9. Tertib administrasi barang milik Negara;
10. Pemanfaatan barang milik Negara;
11. Penilaian barang milik Negara.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Sorong harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Sorong.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Sorong selanjutnya dikembangkan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Sorong sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP Presentase Produktivitas Lelang	80
		1c-CP Indeks Integritas	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Presentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP Presentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Presentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
		3b-CP Presentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100
		3c-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Bendahara Pengeluaran	5a-CP Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
		5b-CP Presentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94

		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang Online	86
6	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	6a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	100
		7b-CP Presentase Kualitas Pengelolaan MBN dan Pengadaan	100
		7c-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15
8	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Ewektif	8a-CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-CP Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		9b-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja KPKNL Sorong Tahun 2023, KPKNL Sorong berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
- b). Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.





DJKN KPKNL
SO RONG

3 BAB TIGA

Akuntabilitas Kinerja

#TRAKOSONG

Tertib
Andalan
Kontributif
Solutif
Ngegas Terus

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian IKU KPKNL Sorong tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Index Max 120%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	110,44	110,44
		1b-CP Presentase Produktivitas Lelang	80	103,70	120,00
		1c-CP Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Presentase Realisasi Pokok Lelang	100	74,84	74,84
		2b-CP Presentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	130,30	130,30
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Presentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	102,24	102,24
		3b-CP Presentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	250,00	120,00
		3c-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100	116,65	116,65
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	0,13	199,48
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	91,80	131,14
		5a-CP Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100		

5	Bendahara Pengeluaran	5b-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	100,00	106,38
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang Online	86	98,99	115,11
6	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	6a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86	98,31	114,31
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	100	97,59	97,59
		7b-CP Presentase Kualitas Pengelolaan MBN dan Pengadaan	100	208,00	120,00
		7c-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15	0,00	120,00
8	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Ewektif	8a-CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Ewektif	60	85,54	120,00
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja TInggi	9a-CP Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	96,55	120,00
		9b-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	120,00	120,00

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2023 terhadap 20 (dua puluh) IKU dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Sorong, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Sebanyak 19 (sembilan belas) IKU status pencapaian **HIJAU**;
- Sebanyak 1 (satu) IKU status pencapaian **MERAH** yaitu IKU 2a-CP Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 74,84 % dari target atau mencapai sebesar Rp. 154.929.274.751,00 dari target sebesar Rp. 207.013.307.000,00.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan KPKNL Sorong tahun 2023 adalah dengan melakukan evaluasi dan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan lindikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan.

a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga. Nilai manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara diperoleh dari:

1) PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara).
- pemanfaatan barang milik negara; dan
- pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.



2) PNBP Piutang Negara

Penerimaan ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku antara lain:

- Pembayaran/pelunasan piutang negara dikenakan biaya administrasi 1% jika pembayaran/pelunasan dilakukan sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit atau 10% jika pembayaran/pelunasan dilakukan setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.
- Penarikan piutang negara oleh penyerah piutang dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5%.

3) PNBP Lelang.

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
a. PNBP Aset	6.000.000.000	9.678.435.470	158,25
b. PNBP Piutang Negara	1.500.000	1.757.021	117,13
c. PNBP Lelang	5.994.000.000	3.567.311.862	59,51
Realisasi IKU	11.995.500.000	13.247.504.353	110,44%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023



b. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Indeks Integritas	88,67	96,02	120,02
Realisasi IKU	88,67	96,02	120,02%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

c. IKU Indeks Integritas

IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu terdiri dari 2 Sub IKU meliputi:

- Indeks Integritas;
- Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP;

IKU ini bertujuan untuk: Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Pelaksanaan Lelang	317	398	125,55
Realisasi IKU	317	398	125,55%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023



2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Pokok Lelang	207.012.307.000	154.929.274.751	74,84
Realisasi IKU	207.012.307.000	154.929.274.751	74,84%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

b. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- Angsuran
- Pelunasan
- Penarikan/ Pengembalian
- Pelunasan
- PSBDT

- Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2022.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Penurunan Outstanding Piutang Negara	1.000.000.000	1.302.975.211	130,30
Realisasi IKU	1.000.000.000	1.302.975.211	130,30%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a. IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
- Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
- Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan.
- K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
- Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.
- Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.



Uraian	Target (bidang tanah)	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Bidang tanah yang disertipikatkan	313	320	102,24
Realisasi IKU	313	320	102,24%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

b. IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- BKPN Lunas
- BKPN Penarikan
- BKPN dikembalikan, dan
- BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Uraian	Target (berkas)	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Berkas Kasus Piutang Negara	4	5	125
Realisasi IKU	4	5	125%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023



c. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68	79,33	116,65
Realisasi IKU	68%	79,33%	116,65%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Deviasi Hasil Penilaian	25	0,11	199,56
Realisasi IKU	25%	0,11%	199,56%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

b. IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian meliputi Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penilaian dapat dikatakan selesai apabila telah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi merupakan tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian	70	100	142,86
Realisasi IKU	70	100	120,02%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan). Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Portofolio Aset	167	167	100
Realisasi IKU	167	167	100%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

b. Persentase Pelaksanaan lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Frekuensi E-Auction	394	394	100
Frekuensi E-Conventional Auction	4	4	100
Realisasi IKU	398	398	100%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

c. Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id

Uraian	Jumlah Permohonan	Jumlah Pelaksanaan	Presentase
E-Auction	398	394	98,51
Realisasi IKU	398	394	98,51%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023



6. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

a. Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan.



Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86	98,99	115,11
Realisasi IKU	86	98,99	115,11%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

a. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Indeks Kualitas Penggunaan Anggaran	100	97,59	116,68
Realisasi IKU	100	97,59	116,68%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 komponen yakni:

- 1) Proses Pengajuan Sertipikasi Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
- 2) Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :
 - a. SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target
 - b. E-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP
 - c. E-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.
 - d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket

di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

- e. E-Kontrak Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

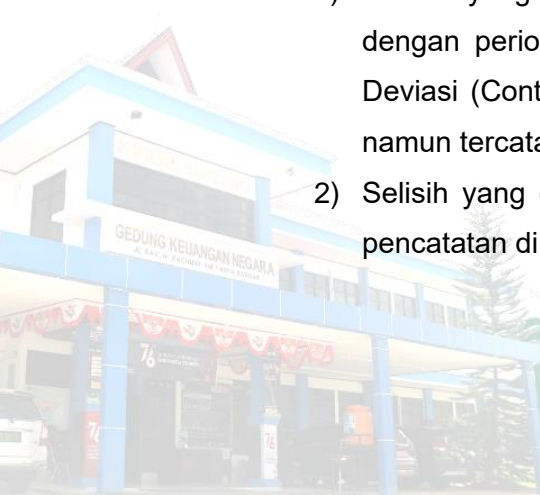
Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Indeks Kualitas Penggunaan Anggaran	100	97,59	116,68
Realisasi IKU	100	97,59	116,68%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

c. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785 Target Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah 15% a. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. b. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi c. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Ketentuan tambahan:

- 1) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBPN disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
- 2) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a.



PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)

- 3) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN

Uraian	Target	Realisasi
Persentase Kualitas Pengeloan BMN dan Pengadaan	100	208
Realisasi IKU	100%	208%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

8. Penguatan Pengawasan Pengendalian yang Efektif

a. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, diantaranya adalah:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
2. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
3. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
4. Kepuasan Stakeholders, dan
5. Hasil Survei Penilaian Integritas.



Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	85,54	142,57
Realisasi IKU	60	85,54	142,57%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

9. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

a. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	96,55	120,69
Realisasi IKU	80	96,55	120,69%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023



b. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah: - bawahan yang akan pensiun di tahun 2023; - bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya - Pegawai pada unit non-eselon.

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Jumlah Pegawai KPKNL Sorong	22	22	100
Realisasi IKU	22	22	100%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2023

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Pembiayaan satuan kerja KPKNL Sorong pada tahun 2023 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 non belanja pegawai sebesar **Rp. 1.778.333.000,00**. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar **Rp. 1.469.564.733,00** atau sebesar **91,19%** dengan rincian sesuai dengan tabel berikut :

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)
Belanja Barang	1.778.333.000	1.621.739.128	91,19
Belanja Modal	0	0	0
Realisasi IKU	Rp1.778.333.000	Rp1.621.739.128	91,19%

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

Untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang optimal pada tahun berikutnya, KPKNL Sorong akan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- Membuat rencana kegiatan dan rencana pencairan anggaran (*disbursement plan*) yang sistematis, efektif, logis dan mudah dilaksanakan dengan peran aktif seluruh seksi/subbagian;
- Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala baik mingguan/bulanan/triulan/semester dan pada akhir tahun.



2. Realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada KPKNL Sorong dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
1	Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Bea Lelang	425782
	2. Pendapatan Bidad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara)	425785
	3. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	425784
2	Penerimaan Umum, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	425122
	2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan	425129
	3. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	425139

PNBP pada KPKNL Sorong yang berasal dari Penerimaan Fungsional sebesar **Rp. 3.581.067.917,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Bidad PPN sebesar Rp. 1.757.021,- (MAP 425785);
- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp. 985.944.458,- (MAP 425782);
- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp. 2.581.367.404,- (MAP 425784);
- Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp. 202.362,- (MAP 425699);
- Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp. 11.796.672,- (MAP 425999)
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 48.399.000,- (MAP 425122)
- Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak sebesar Rp. 14.085.396,- (MAP 425995)
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 6.494.000,- (MAP 425912)





DJKN KPKNL
SOSONG

4 BAB EMPAT

Penutup



#TRAKOSONG

Tertib
Andalan
Kontributif
Solutif
Ngegas Terus

A. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja KPKNL Sorong tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Sorong sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Sorong telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Sorong senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2023 yang cukup memuaskan dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Sorong mencapai 111,21%%.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH UNTUK TAHUN MENDATANG

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Sorong mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan stakeholder lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Sorong. Laporan Kinerja tahun 2023 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Sorong pada periode berikutnya.



**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL SORONG
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective(30%)								33,10%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							110,33%	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	110,44%	14%	33,33%	110,44%	110,44%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	103,70%	14%	33,33%	129,63%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67	89,17	14%	33,33%	100,56%	100,56%	hijau
Customer Perspective(20%)								19,48%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							97,42%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	74,84%	14%	50,00%	74,84%	74,84%	merah
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	130,30%	14%	50,00%	130,30%	120,00%	hijau
Internal Process Perspective (25%)								28,72%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							111,82%	
3a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/L	100,00%	102,24%	19%	40,43%	102,24%	102,24%	hijau
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	250,00%	14%	29,79%	250,00%	120,00%	hijau
3c-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68,00%	79,33%	14%	29,79%	116,65%	116,65%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,13%	14%	56,00%	199,48%	120,00%	hijau
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/H	70	91,80	11%	44,00%	131,14%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113,36%	
5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/H	100%	140,00%	11%	28,21%	140,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	100,00%	14%	35,90%	106,38%	106,38%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86%	98,99%	14%	35,90%	115,11%	115,11%	hijau
6	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							114,31%	
6a-CP	Tingkat efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	P/M	86%	98,31%	14%	100,00%	114,31%	114,31%	hijau
Learning & Growth Perspective (25%)								29,91%	
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							118,89%	
7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100,00%	97,59%	14%	33,33%	97,59%	116,68%	hijau
7b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	208%	14%	33,33%	208,00%	120,00%	hijau
7c-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	33,33%	200,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%	
8a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	P/M	60	85,54	14%	100,00%	142,57%	120,00%	hijau
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							120,00%	
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	96,55	14%	50,00%	120,69%	120,00%	hijau
9b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100,0%	120,00%	14%	50,00%	120,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,21%	hijau

HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI
 PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
 BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
 PERIODE: TRIWULAN IV-AKHIR

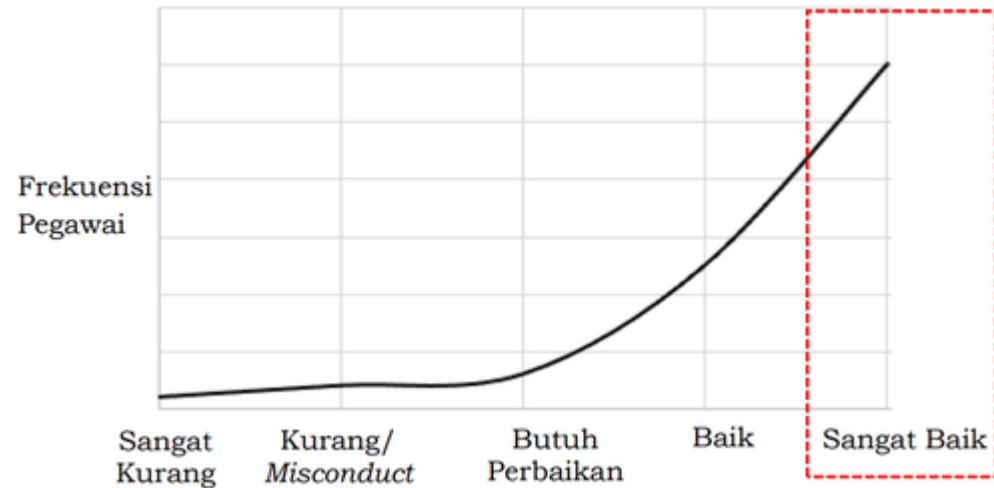
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Antonius Arie Wibowo	1	NAMA	Wibawa Pram Sihombing
2	NIP	19780902 200012 1 001	2	NIP	19760906 199903 1 001
3	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina (IV/a)	3	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
5	UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 ISTIMEWA

POLA DISTRIBUSI



HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. UTAMA						
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan	110,44	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Produktivitas Lelang	80	Penerima Layanan	116,14	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
3	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Integritas	88,67	Penerima Layanan	89,17	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan	74,84	Yuk kita diskusikan lagi terkait rencana ke depan. Jangan menyerah. Saya tahu kamu bisa.
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan	120	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
6	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	Proses Bisnis	102,24	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.

HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60	Proses Bisnis	150	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
8	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68	Proses Bisnis	79,33	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
9	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	Proses Bisnis	0,16	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis	94,72	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
11	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis	140	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	Proses Bisnis	100	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
13	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	52,25	Proses Bisnis	99,21	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
14	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	68	Proses Bisnis	82,2	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran	116,68	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.

HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran	208	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
17	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15	Penguatan Internal atau Anggaran	0	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
18	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif 8a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran	85,54	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
19	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran	96,55	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
20	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran	120	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
B. TAMBAHAN						
21	Penyelesaian Sosialisasi Program Afiriasi Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2023	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Afiriasi PKN STAN dalam SPMB PKN STAN	5	Penerima Layanan	5	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.
22	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Persentase Penyelesaian Joint Program Penerimaan Sekretariat Bersama Wilayah Papua Barat Daya	100	Proses Bisnis	100	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.

HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Persentase Penyelesaian Program Kerja Tim Penyelesaian Aset Eks Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation)	100	Proses Bisnis	100	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.
24	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Pelaksanaan Showcase ALCO Regional	100	Proses Bisnis	100	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.
25	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembangunan ZI WBBM Tahun 2023	100	Proses Bisnis	100	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.
RATING HASIL KERJA						
DI ATAS EKSPEKTASI						
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		- "Keren sekali, terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil anda tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini" - Keren sekali, terima kasih atas kerja sama dan komitmen terbaik yang berhasil Bapak tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
			<ul style="list-style-type: none"> - Evaluee konsisten menerapkan standar perilaku kerja untuk diri sendiri, menjadi contoh, dan mengajak pegawai lain untuk berperilaku serupa - layanan prima yang kereen kepada pengguna layanan dan terima kasih telah menjadi teladan bagi pegawai lainnya - terima kasih sudah menciptakan berbagai inovasi layanan pada KPKNL Sorong sehingga mendapatkan beberapa penghargaan. Agar terus dikembangkan berbagai inovasi layanan pada tahun 2024 dengan mengacu kebutuhan pengguna layanan KPKNL Sorong.
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Keren sekali, terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil anda tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini" - Keren sekali, terima kasih atas kerja sama dan komitmen terbaik yang berhasil Bapak tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini - Evaluee konsisten menerapkan standar perilaku kerja untuk

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
			<p>diri sendiri, menjadi contoh, dan mengajak pegawai lain untuk berperilaku serupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kereen, komitmen integritas teruji dan menjadi teladan bagi pegawainya - Terima kasih sudah menjaga integritas dan mengembangkan kegiatan untuk membangun integritas pada KPKNL Sorong.
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Keren sekali, terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil anda tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini" - Terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil anda tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini - Evaluee konsisten menerapkan standar perilaku kerja untuk diri sendiri, menjadi contoh, dan mengajak pegawai lain untuk berperilaku serupa - terima kasih atas kerja yang optimal dan penuh tanggung jawab serta menjadi panutan bagi pegawainya - Agar terus melakukan pengembangan diri khususnya untuk kompetensi yang masih

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG dibawah standar kompetensi.	
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Keren sekali, terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil anda tunjukkan dalam tugas pekerjaan selama ini" - Keren sekali, terima kasih atas kerja sama dan komitmen terbaik yang berhasil Bapak tunjukkan dalam tugas pekerjaan selama ini - Evaluee konsisten menerapkan standar perilaku kerja untuk diri sendiri, menjadi contoh, dan mengajak pegawai lain untuk berperilaku serupa - kerja kolaboratifnya kereen, tetap menjadi teladan bagi pegawai lainnya - Terima kasih sudah berkolaborasi dengan baik bersama stakeholder internal Kemenkeu satu dan eksternal.
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Keren sekali, terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil anda tunjukkan dalam tugas pekerjaan selama ini" - Keren sekali, terima kasih atas kerja sama dan komitmen terbaik yang berhasil Bapak

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
			<p>tunjukkan dalam tugas pekerjaan selama ini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluee konsisten menerapkan standar perilaku kerja untuk diri sendiri, menjadi contoh, dan mengajak pegawai lain untuk berperilaku serupa - kereen, komitmen integritas teruji dan menjadi teladan bagi pegawainya - Terima kasih sudah menjaga integritas dan mengembangkan kegiatan untuk membangun integritas pada KPKNL Sorong.
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Keren sekali, terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil anda tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini" - Keren sekali, terima kasih atas kerja sama dan komitmen terbaik yang berhasil Bapak tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini - Evaluee konsisten menerapkan standar perilaku kerja untuk diri sendiri, menjadi contoh, dan mengajak pegawai lain untuk berperilaku serupa - terima kasih atas sikap adaptif dan proaktif dalam bekerja

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
			serta menjadi teladan bagi pegawainya - Agar terus melakukan antisipasi atas berbagai inisiatif baru yang dikembangkan di DJKN dan melakukan penyesuaian
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Keren sekali, terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil anda tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini" - Keren sekali, terima kasih atas kerja sama dan komitmen terbaik yang berhasil Bapak tunjukan dalam tugas pekerjaan selama ini - Evaluee konsisten menerapkan standar perilaku kerja untuk diri sendiri, menjadi contoh, dan mengajak pegawai lain untuk berperilaku serupa - kerja kolaboratifnya kereen, tetap menjadi teladan bagi pegawai lainnya - Terima kasih sudah berkolaborasi dengan baik bersama stakeholder internal Kemenkeu satu dan eksternal.
RATING PERILAKU KERJA			
DI ATAS EKSPEKTASI			

PERILAKU KERJA	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI SANGAT BAIK	

24 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001





DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PERIODE: TRIWULAN IV-AKHIR

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2023

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: Antonius Arie Wibowo
	NIP	: 19780902 200012 1 001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina (IV/a)
	JABATAN	: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong
	UNIT KERJA	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: Wibawa Pram Sihombing
	NIP	: 19760906 199903 1 001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Utama Muda (IV/c)
	JABATAN	: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
	UNIT KERJA	: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: Rionald Silaban
	NIP	: 19660423 199010 1 001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Utama (IV/e)
	JABATAN	: Direktur Jenderal Kekayaan Negara
	UNIT KERJA	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: ISTIMEWA
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: SANGAT BAIK
5.	CATATAN/ REKOMENDASI	
	-	

Pegawai yang Dinilai

24 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Antonius Arie Wibowo
19780902 200012 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-03/WKN.17/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SORONG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SORONG
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		3c-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%
		5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		5c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
8.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	8a-CP	Indeks Integritas Organisasi	94,33
		8b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
9.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		9b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%



Program/Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	160.095.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	5.498.000
2. Pengelolaan Aset	Rp	154.597.000
Dukungan Manajemen	Rp	1.187.839.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	13.478.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.153.083.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	7.066.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	14.212.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Sorong



Ditandatangani Secara Elektronik
Antonius Arie Wibowo



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SORONG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%
7a-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
8	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
8a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
8b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
9b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Sorong,



Ditandatangani Secara Elektronik
Antonius Arie Wibowo



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif / Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Dashboard KASUARI (Katalog Informasi Pengguna Layanan Terintegrasi)	Katalog Layanan KPKNL	Q 1 : Penyusunan Sistem Sesuai Proses Bisnis	Q1: Susunan Layanan yang akan di tampilkan	Q1 s.d Q4 Tahun 2023	Seluruh Seksi dan Jabatan Fungsional pada KPKNL Sorong	-
				Q2: Pengujian Dashboard dan penyempurnaan	Q2: Preview tampilan Dashboard			
				Q3: Sosialisasi dan Implementasi pada Satuan Kerja	Q3: Laporan Kegiatan dan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Penggunaan Dashboard	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			
2	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif / Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Sosialisasi PANGESTU (Pelatihan Keuangan Terpadu Satu)	Peningkatan Kompetensi SDM mengenai Pengelolaan Keuangan Negara pada Satuan Kerja/Stakeholder	Q1: Pelaksanaan Dialog dengan Stakeholders terkait materi	Q1: Daftar Materi yang dibutuhkan Satuan Kerja	Q1 s.d Q4 Tahun 2023	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	-
				Q2 : Penyusunan Materi dan Narasumber	Q2: Daftar Kurikulum			
				Q3 : Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			



Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Sorong



Ditandatangani Secara Elektronik
Antonius Arie Wibowo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Antonius Arie Wibowo	NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo	
NIP	197809022000121001	NIP	197209021993011001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan



3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
		Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	Proses Bisnis
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Integritas Organisasi	94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai</p>



PERILAKU KERJA		
	<p>secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara - 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

31 Januari 2023

Pegawa



Pejabat I



Ditandatangani secara elektronik
 Antonius Arie Wibowo
 197809022000121001

Ditandatangani secara elektronik
 Nikodemus Sigit Rahardjo
 197209021993011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	25 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		40%	40%	60%	60%	100%	100%
6	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%



7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		50%	50%	55%	55%	68%	68%
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
12	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
13	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
14	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50%	50%		50%	86%	86%
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
17	Indeks Integritas Organisasi						94,33	94,33
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60



	19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
	20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
KONSEKUENSI									
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

31 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik
 Antonius Arie Wibowo
 197809022000121001



Ditandatangani secara elektronik
 Nikodemus Sigit Rahardjo
 197209021993011001





DJKN **KPKNL**
SORONG




Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong

Presented By:

Tim Penyusun Laporan
Kinerja Tahun 2023

2023

-  @kpknlSORONG_
-  0951-3160219
-  www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong

